

**KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PAJAK
DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**UL ZANA MUFIDA RAHMAH
NPM: 1751010146**

Jurusan: Ekonomi Syariah



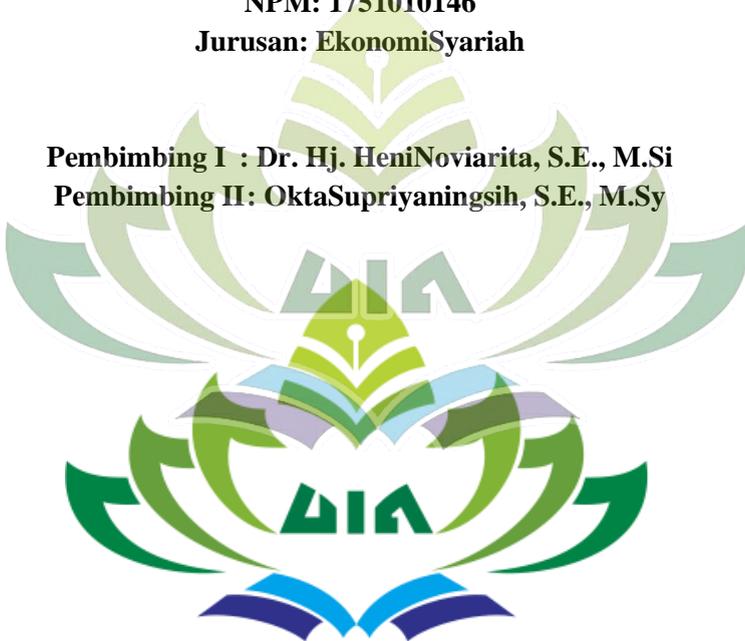
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021**

**KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PAJAK
DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Provinsi Jawa Barat)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:
UL ZANA MUFIDA RAHMAH
NPM: 1751010146
Jurusan: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si
Pembimbing II: Okta Supriyaningsih, S.E., M.Sy**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Tingkat kemiskinan di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan di negara maju. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui pendapatan negara berupa pajak daerah, namun rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi dalam kurun waktu 10 tahun yakni tahun 2010-2019 yaitu sebesar 11,047%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 10 tahun yakni tahun 2010-2019, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. data yang telah didapat dianalisis menggunakan program SPSS 26, menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai t hitung -2,336 dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ sehingga variabel pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Variabel pajak daerah mampu menjelaskan sebesar 40,6 % terhadap variabel kemiskinan. Islam tidak menghendaki umatnya untuk menjadi miskin. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Cara mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam yaitu dengan bekerja keras, tidak meminta-minta, tidak pelit dalam membantu orang miskin dan tidak bermalas-malasan.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Kemiskinan, Pajak Daerah

ABSTRACT

Poverty is a problem experienced by both developed and developing countries. Poverty rates in developing countries are higher than in developed countries. Various government efforts have been made to alleviate poverty in Indonesia, one of which is through state revenue in the form of local taxes, but the average poverty rate in Indonesia is still quite high in the 10 year period, namely 2010-2019, wich is 11.047%. This study aims to determine how much influence local taxes have in alleviating poverty in Indonesia.

The method used in this study was a quantitative method. The data source used was secondary data published by the Central Statistics Agency (BPS). The number of samples used in this study was West Java Province within a period of 10 years, in 2010-2019, with the sampling technique using the Purposive Sampling technique. The data that had been obtained were analyzed using the SPSS 26 program, using simple linear regression analysis to determine the effect of local taxes inalleviating poverty.

Based on the results of the analysis that had been carried out, the results of the study stated that the local tax variable had a significant negative effect on poverty with a t count-2.336 and a significance value of $0.048 < 0.05$ so that the local tax variable has a negative effect on poverty. The local tax variable is able to explain 40.6% of the poverty variable. Islam does not want its people to be poor. Islam is very concerned about the welfare of its people. The way to alleviate poverty in the perspective of Islamic economic is by working hard, not begging, not being stingy in helping the poor and not being lazy.

Keywords: *Islamic Economic, Poverty, Local Tax*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UI Zana Mufida Rahmah
NPM : 1751010146
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pajak Daerah Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Jawa Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 April 2021
Penulis,

UI Zana Mufida Rahmah
NPM. 1751010146



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pajak Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Jawa Barat)
Nama : Ul Zana Mufida Rahmah
NPM : 1751010146
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

NIP. 196511201992032002

Pembimbing II,

Okta Supriyaningsih, S.E., M.Sy

NIK. 2013010919841028163

Ketua Jurusan,

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pajak Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Jawa Barat)”** disusun oleh **Ul Zana Mufida Rahmah**, NPM : **1751010146**, program studi **Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: **Senin, 21 Juni 2021.**

TIM PENGUJI

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I

Sekretaris : Dania Hellin Amrina, S.E., M.Sc

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Penguji III : Okta Supriyaningsih, S.E., M.Sy



**Mengetahui,
Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

198008012003121001

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, makaterimalah. Dan apa yang dilarangnyabagimu, makatinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatkerashukumannya.”

(QS. Al-Hasyr : 7)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Suyadi dan Ibu Rubiyah yang selalu memberikan dukungan dan doa, memberikan motivasi untuk menguatkan saya, memberi materi serta waktu yang tiada henti untuk mewujudkan keberhasilanku. Adik ku tersayang Hadad Janu Al Faqih dan Nur Hafifah Tri Astuti yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ul Zana Mufida Rahmah, dilahirkan di kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Mei 1999, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Suyadi dan Ibu Rubiyah. Pendidikan dimulai dari jenjang TK Dharmawanita Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2005. Pendidikan SDN 01 Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2011. Pendidikan SMPN 1 Rawajitu Timur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2014. Pendidikan SMKN Rawajitu Timur jurusan Akuntansi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

Selama berkuliah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai bendahara umum pada tahun 2020. Selain itu, di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tulang Bawang, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai wakil ketua pada tahun 2021.



Bandar Lampung, 12 April 2021
Penulis

Ul Zana Mufida Rahmah
NPM : 1751010146

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu syariah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Kawan seperjuangan Nurul Azizah Putri, Rahmawati, Rama Yuda dan Piga Anugerah Putra yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
7. Kawan-kawan seperjuangan Kelas E Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 yang telah kebersamai penulis dalam menimba ilmu dalam aspek akademik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 12 April 2021
Penulis

Ul Zana Mufida Rahmah
NPM. 1751010146



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	15
1. Kebijakan Fiskal	15
2. Sumber Pendapatan Negara	27
3. Kemiskinan	35
B. Pengujian Hipotesis	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	55

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Definisi Operasional Variabel	57
E. Metode Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	64
1. Analisis	64
2. Hasil Penelitian.....	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi	85

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.....	2
1.2 Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.....	2
2.1 Indikator-indikator Kemiskinan	19
3.1 Definisi Operasional Variabel	27
4.1 Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.....	30
4.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat	30
4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	31
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	32
4.5 Hasil Uji Glejser	32
4.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	33
4.7 Hasil Uji T.....	34
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	34



DAFTAR GAMBAR

4.1 Uji Normalitas Metode Grafik Histogram.....	31
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019.....	I
Lampiran 2 : Data Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019.....	I
Lampiran 3 : Uji Normalitas	I
Lampiran 4 : Uji Autokorelasi.....	II
Lampiran 5 : Uji Heteroskedasitas	II
Lampiran 6 : Persamaan Regresi Linier Sederhana dan Uji T	III
Lampiran 7 : Koefisien Determinasi	III



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah kata dalam judul skripsi ini. Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman maka perlu adanya penegasan judul dan diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pajak Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Jawa Barat)”**. Adapun uraian dari beberapa istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. **Kebijakan Fiskal** adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kondisi perekonomian menjadi yang lebih baik atau dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.¹
2. **Kemiskinan** adalah ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar atas setiap aspek kehidupan.²
3. **Pajak** berdasarkan undang-undang adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal dan pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak bisa melakukan kewajibannya.³
4. **Ekonomi Islam** adalah tata aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun

¹Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi)*, 3rd ed. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015). H. 445

²Umarudin Usman, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau,” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Malikussaleh* 01 (Agustus 2018).

³Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi)*, 446.

kelompok atau negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pemasukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan perspektif ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah lama menjadi permasalahan di pemerintahan dunia. Kemiskinan meliputi dari kemiskinan individu dan kemiskinan regional. Sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang tertinggal, layanan publik, dan lingkungan yang sering berpotensi bencana mempengaruhi kemiskinan regional. Sedangkan yang mempengaruhi kemiskinan individu adalah ketidakmampuan mengembangkan diri, kondisi kehidupan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah serta populasi dan pengangguran di desa yang tinggi.⁵ Tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi, yaitu adanya kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin. Berikut data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019 :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2010	4.773,72
2011	4.648,63
2012	4.421,48

⁴Hasan Andy, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁵Aminah Nur Habibah, dkk, "Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020.

2013	4.382,65
2014	4.238,96
2015	4.485,65
2016	4.168,11
2017	3.774,41
2018	3.539,40
2019	3.375,89

Sumber : Data Badan Pusat Statistik tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1. di atas pada tahun 2010-2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan, di tahun 2015 mengalami kenaikan dan di tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Naik turunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat selama satu dekade dikarenakan adanya pergerakan ekonomi dan perubahan aktivitas ekonomi.

Kebijakan fiskal mempunyai peran terhadap aktivitas ekonomi di sebuah pemerintahan. Indonesia memiliki kebijakan fiskal dengan berbagai kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di provinsi.⁶Salah satu komponen pendapatan dalam kebijakan fiskal yaitu, pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang keuangan daerah yang mempunyai kontribusi besar dalam membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu indikator kemandirian ekonomi suatu daerah, semakin tinggi penerimaan pajak suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian ekonomi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.⁷Berikut data data pajak

⁶Nur Habibah, dkk.

⁷Nadya Sarjono, Choirul Anwar, and Darmansyah, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," *Universitas Pancasila, Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 6 (2018): 113.

daerah dan penerimaan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2019 :

**Tabel 1.2Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2010-2019**

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah
2010	Rp 9.742.187.781	Rp 6.470.866.063
2011	Rp 11.053.859.588	Rp 7.696.484.754
2012	Rp 16.878.128.995	Rp 9.149.214.330
2013	Rp 16.651.601.834	Rp 11.236.145.855
2014	Rp 19.907.973.000	Rp 13.753.760.403
2015	Rp 24.009.981.000	Rp 14.617.071.393
2016	Rp 27.694.035.000	Rp 15.727.483.590
2017	Rp 32.163.957.000	Rp 16.483.085.761
2018	Rp 31.961.202.000	Rp 18.153.616.036
2019	Rp 34.882.309.000	Rp 18.394.357.886

Sumber : Data Badan Pusat Statistik tahun 2020

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilakukan. Penggunaan dalam uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pendapatan dari pajak digunakan untuk pembiyaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang

semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Maka dari itu, peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair dari pajak.⁸

Pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 1.2 di atas, kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2019, yaitu lebih dari 50%, pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan daerah, yaitu sebesar 87%. Pendapatan daerah dan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010-2019. Jumlah penerimaan pajak daerah ditentukan oleh kondisi perekonomian disekitarnya, karena semakin kuat aktivitas ekonomi masyarakat maka akan menumbuhkan pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktivitas ekonominya tersebut.

Disisi lain kenyataannya bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah dilihat dari tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang ada tidak selalu berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, hal ini bertentangan dengan teori pembangunan menurut Todaro, mengartikan bahwa pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.⁹

Meningkatnya pajak daerah tidak selalu berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut pernah diteliti oleh

⁸Syafi'i and Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek* (Gema Insani, 2001).

⁹Sarjono, Anwar, and Darmansyah, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," 114.

Prasetyo pada provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tetapi justru dapat meningkatkan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, ternyata berdampak pada peningkatan pengangguran.¹⁰

Penelitian ini mengkaji tentang teori fungsi pajak daerah terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pajak daerah terhadap penurunan kemiskinan di provinsi Jawa Barat.

Prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan anggaran bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang dengan menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Menurut Prof. Dr. M. A. Mannan, pakar ekonomi Islam kontemporer, diantara semua kitab suci yang ada, hanya Al-Qur'an yang memerintahkan secara tepat mengenai kebijakan negara dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Seperti yang tercantum dalam Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

ط
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁰Hermawan B. Prasetyo and Arif Farid, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran," *STIE Cendekia Bojonegoro*, Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi, 6 (2012): 112.

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr : 7)

Tafsir dari Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu Allah lalu menjelaskan apa itu fai' dan peruntukannya. Harta rampasan dari mereka, musuh-musuh Allah yang meninggalkan hartanya tanpa perlawanan, maka harta itu diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, penyalurannya adalah untuk Allah, untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial; untuk Rasul guna menopang perjuangan Islam; untuk kerabat Rasul yang membutuhkan bantuan; untuk anak-anak yatim guna menopang pendidikan mereka; untuk orang-orang miskin agar bisa mengembangkan diri; dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan guna mencari penghidupan yang lebih baik. Singkatnya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam ber-Islam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah sebagai sesuatu yang harus dijauhi, karena di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, dunia akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya bagi kaum yang menolak beriman kepada Rasulullah padahal mereka

mengetahui bahwa beliau sebenarnya utusan Allah seperti kaum Yahudi di Madinah.¹¹

Pada masa Rasulullah SAW, harta *fa'I* dibagi menjadi dua puluh lima bagian. Dua puluh lima bagian menjadi milik Rasulullah SAW. Beliau menyalurkan sesuai dengan kebijaksanaan beliau, untuk diri dan keluarga yang beliau tanggung maupun selain dari mereka. Sedangkan lima bagian sisanya, dibagikan sebagaimana pembagian *ghanimmah*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun terdapat indikasi yang kuat bahwa terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, namun realisasinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Jumlah penduduk yang miskin cukup tinggi dan jika terjadi sedikit gejolak, maka mereka akan kembali miskin.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan *gap* penelitian, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan “**KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PAJAK DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Provinsi Jawa Barat)**”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, maka terdapat berbagai permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis. Perumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan negara diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

¹¹“Qur’an Kemenag,” July 7, 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/59/7>.

¹²Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13, no. 1 (April 2012): 72–82.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bisa menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Kemiskinan masih menjadi masalah klasik Negara Indonesia yang belum terselesaikan.
4. Adanya kemiskinan ditandai dengan adanya keterbelakangan dan pengangguran yang bisa meningkat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan karena kebijakan fiskal Indonesia sangat luas sekali maka penulis membatasi penelitian yang berjudul “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pajak Daerah Perspektif Ekonomi Islam” dengan batasan hanya soal penerimaan pemerintah dari tahun 2010-2019. Penulis lebih memfokuskan penelitian pada sisi penerimaan guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui pajak daerah dalam perspektif Ekonomi Islam. Penerimaan Negara berupa pajak daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh kebijakan fiskal Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan melalui pajak daerah ?
2. Bagaimanakah kebijakan fiskal Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan melalui pajak daerah perspektif ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti dan mengetahui pengaruh kebijakan fiskal Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan melalui pajak daerah.
2. Untuk meneliti dan mengetahui kebijakan fiskal Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan melalui pajak daerah perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan Ilmu Ekonomi Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan dalam perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. **Heru Setiawan**, dengan judul analisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap kinerja makroekonomi di Indonesia dengan model *structural vector autoregression* (SVAR) pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dilakukan oleh Blanchard dan Perotti yang meneliti dampak kebijakan fiskal di negara-negara OECD dengan model *structural vector autoregression* (SVAR). Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong permintaan

agregat. Alternatif kebijakan yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal adalah kenaikan belanja yang dibarengi dengan pemotongan pajak.¹³

2. **I Komang Gde Bendesa, Ni Putu Wiwin Setyari**, dengan judul Kebijakan fiskal dalam trend pembangunan ekonomi jangka panjang pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari berbagai sumber, teknik analisis yang digunakan yaitu analisa kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif namun pertumbuhannya masih kecil dan hanya sedikit di atas pertumbuhan pendapatan (PDB). Faktor penting yang mempengaruhi penerimaan pajak secara positif adalah pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi penurunan pajak adalah peran pertanian yang diukur dari kontribusinya pada pendapatan nasional dan pengangguran.¹⁴
3. **Shandy Janifer Matitaputty, Agnes Arie Mintarry, Rini Hastuti dan Agung Sugiarto**, dengan judul Pengaruh Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis pengaruh pajak terhadap kesejahteraan dilihat melalui analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang tergolong sangat kuat terhadap presentase jumlah penduduk miskin. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak, secara umum memberikan ruang gerak

¹³Heru Setiawan, "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3, no. 2 (Desember 2018): 28.

¹⁴I Komang Gde Bendesa and Ni Putu Wiwin Setyari, "Kebijakan Fiskal Dengan Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Pada Tahun 2020," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13, no. 1 (February 2020): 8 dan 29.

bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.¹⁵

4. **Hikmathiar Ramadhan, Tatik Mariyanti**, dengan judul Pengaruh Pajak, Subsidi dan ZIS Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif tahunan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara pajak, subsidi dan ZIS terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, subsidi dan ZIS tidak secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.¹⁶
5. **Vera Lisna, Bonar M.Sinaga, Muhammad Firdaus, Slamet Sutomo**, dengan judul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan pada tahun 2013. Penelitian ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan *pro-poor* melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan.¹⁷

¹⁵Shandy Jannifer Matitaputty, dll, "Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang*, 2020.

¹⁶Hikmathiar Ramadhan and Tatik Mariyanti, "Pengaruh Pajak, Subsidi Dan ZIS Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Trisakti, Indonesia* 22 (2014).

¹⁷Vera Lisna,dkk, "Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan," *Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Pascasarjana IPB, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14 (July 2013).

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang penegasan dari judul penelitian yang menjelaskan tentang istilah yang ada dalam judul supaya tidak terjadi kekeliruan, latar belakang masalah berisi tentang masalah pokok dari penelitian yang akan dianalisis, identifikasi dan batasan masalah berisi tentang pengidentifikasian terhadap masalah penelitian dan masalah dalam penelitian ini memiliki batasan, rumusan masalah berisi tentang permasalahan apa yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, tujuan penelitian berisi tentang hasil atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, manfaat penelitian berisi tentang manfaat secara praktis maupun teoritis dari penelitian, kajian penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang menjadi dasar atau acuan penelitian serta berhubungan dengan penelitian ini dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan dengan singkat.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menyangkut variabel-variabel yang diteliti berupa tinjauan umum ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentang penerimaan dan pengeluaran negara serta kemiskinan, sehingga dapat menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini dan hipotesis penelitian perkiraan hasil serta menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder dari berbagai sumber dan literatur, definisi operasional variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi sederhana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian berupa seberapa besar pengaruh pajak daerah dengan pengentasan kemiskinan hasil regresi hubungan antara pajak daerah dan kemiskinan di Indonesia tahun 2010-2019 beserta hasil analisis penelitian.

BAB V

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pembaca atau peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan objek atau teori yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Fiskal

a. Teori Kebijakan Fiskal

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh teori Keynes yang lahir sebagai reaksi atas terjadinya depresi besar (*great depression*) yang melanda perekonomian Amerika pada tahun 1930-an. Keynes mengkritik pendapat ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai *full employment* sehingga setiap tambahan belanja pemerintah akan menyebabkan turunnya pengeluaran swasta (*crowding out*) dalam jumlah yang sama atau dengan kata lain setiap tambahan belanja pemerintah tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat.

Keynes mengemukakan bahwa sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian menuju kondisi *full employment*, untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk berbagai kebijakan, salah satu perwujudannya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Keynes, setiap tambahan belanja pemerintah tidak hanya merelokasi sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, tetapi juga disertai dengan adanya dampak pengganda fiskal (*multiplier effect*) atas belanja tersebut.¹⁸

Kebijakan fiskal menurut Keynes akan menghasilkan angka pengganda fiskal bagi output nasional. Dasar pemikiran dari Keynes adalah bahwa

¹⁸Setiawan, "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)," 24.

ekspansi fiskal menimbulkan dampak pengganda terhadap permintaan agregat kemudian sejalan dengan kondisi penawaran agregat yang masih mampu untuk merespon kenaikan permintaan agregat, maka hal itu tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Pada dasarnya instrumen kebijakan fiskal sangat beragam dan berkaitan dengan keuangan negara seperti perpajakan, bea cukai, utang, desentralisasi fiskal, dan sebagainya. Secara umum, kebijakan fiskal ditempuh melalui dua sarana yaitu dengan mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah yang tercermin dalam APBN setiap tahun anggaran.

Pada teori makroekonomi dan keuangan publik, model ekonomi tidak dibangun atas persamaan tunggal, tetapi oleh sistem persamaan struktural. Oleh karena itu, perubahan dalam satu variabel makroekonomi akan berpengaruh secara simultan terhadap variabel makro yang lain. Sasaran akhir dari kebijakan makroekonomi adalah untuk mencapai output yang tinggi, inflasi yang terkendali dan pengangguran yang rendah, sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengubah-ubah penerimaan pajak dan belanja pemerintah.¹⁹

b. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sering juga disebut sebagai “Politik Fiskal” atau “*fiscal policy*”, dapat diartikan dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena itu, anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa

¹⁹Setiawan, 26.

hasil pemungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “*government expenditure*” dan “*government transfer*”, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.²⁰

c. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

²⁰Anas Malik, *Ekonomi Makro & Mikro*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), 131.

- 1) Fungsi alokasi mengandung esensi mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penerapan fungsi ini kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal.
- 2) Fungsi distribusi menyangkut sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Untuk mencapai kebijakan fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan Negara.
- 3) Fungsi Stabilisasi esensinya adalah untuk mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Pada fungsi stabilitas beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang memadai.²¹

Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi fungsi stabilitas dan kebijakan fiskal. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.²²

Tujuan dari kebijakan fiskal adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak

²¹Hayat Abdullah, "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan," *Jurnal Bina Praja*, 6, no. 2 (June 2014): 117–28.

²²Venti Eka Satya, "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013," *Jurnal Kajian*, 19, no. 2 (June 2014).

atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum dipihak lain. Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perusahaan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.²³

Dalam perubahan pasar barang dan jasa, terlihat bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan, yaitu :

- 1) Menjamin pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang potensial.
- 2) Menciptakan tingkat harga umum yang stabil dan wajar.
- 3) Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa merintangi tujuan lain dari masyarakat.²⁴

d. Teori Kebijakan Fiskal dalam Islam

Abu Yusuf merupakan ahli fiqih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pajak. Subjek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan. Abu Yusuf mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan

²³Muhammad Fauzan, "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khatab," *Human Falah*, 4, no. 1 (June 2017).

²⁴I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Teori Dan Empirikal* (Jakarta: Kencana, 2011), 13.

amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka.²⁵

Abu Yusuf adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan. Abu Yusuf menentang keras pajak pertanian. Ia menyarankan supaya petugas pajak diberi gaji. Tindakan mereka harus selalu diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan seperti korupsi dan praktik penindasan. Kontribusi besar dalam menentukan kewajiban-kewajiban penguasa, status *Baitul Maal*, prinsip-prinsip perpajakan dan hubungan pertanian yang kondusif untuk kemajuan sosial. Abu Yusuf menganalisis permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Abu Yusuf menggunakan ayat Al-Qur'an untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadopsi, seperti yang terdapat pada Surat Al-Anfal ayat 41 :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيِ
الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾﴾

Artinya: “Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah , rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami

²⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017), 154.

(Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal: 41)

Tafsir Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41, yaitu setelah memerintahkan umat Islam memerangi orang-orang kafir jika mereka memerangi umat Islam, maka pada ayat ini Allah menjelaskan ketentuan pembagian ganimah, yang ketentuannya hanya dilakukan oleh Allah semata. Karena itu, ketahuilah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran, maka seperlima untuk Allah, Rasul yang digunakan untuk kemaslahatan umat yang ditetapkan sendiri oleh beliau, kerabat Rasul, Bani Hasyim dan Bani Muattalib, anak yatim, karena mereka kehilangan orang tua yang bertanggung jawab untuk membiayai hidupnya, orang miskin yang membutuhkan bantuan, dan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ketika sedang dalam perjalanan. Demikian ini, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan berupa ayat-ayat yang berfungsi untuk penguatan mental dan pertolongan, kepada hamba Kami, Nabi Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan pada Perang Badar, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang dalam hitungan kalian kalah, sementara mereka menduga keras akan memperoleh kemenangan, ternyata kaum musliminlah yang memperoleh kemenangan berkat pertolongan Allah, sebab Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, termasuk memenangkan kelompok kecil atas kelompok yang besar.²⁶

Pembagian *Khums* ini memberikan 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya

²⁶“Qur'an Kemenag.”

adalah saham bagi yang ikut peperangan. Abu Yusuf telah berbicara tentang kemampuan dalam membayar pajak dan kenyamanan dalam membayar pajak. Kontribusi yang lain adalah dengan menunjukkan keunggulan sistem proporsional (*muqasamah*) menggantikan sistem pajak tetap (*misahah atau waziyah*) pada tanah.²⁷

Abu Yusuf lebih menyukai negara untuk mengenakan sewa proporsional atas produksi pertanian yang diproduksi oleh orang yang mengolahnya dibandingkan dengan menetapkan sebuah sewa terhadap tanah pertanian. Hal ini lebih adil dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan memfasilitasi ekspansi dari area yang digunakan untuk pertanian. Dalam perpajakan, Abu Yusuf telah memberikan beberapa prinsip yang dapat mengantisipasi apa yang berabad-abad kemudian diperkenalkan oleh ekonom sebagai “*canons of taxation*”. Pada penggunaan dana publik, Abu Yusuf mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dalam meningkatkan pendapatan negara. Kemampuan membayar, kemudahan pembayar pajak dengan memperhatikan unsur waktu, tempat dan cara pembayaran, dan sentralisasi dari pengambilan keputusan dari administrasi pajak merupakan beberapa prinsip yang telah dikembangkan oleh Abu Yusuf.²⁸

e. Kebijakan Fiskal dalam Persepektif Islam

Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilik swasta diakui oleh pemerintah yang bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen untuk mencapai keberlangsungan ekonomi untuk masyarakat yang besar jumlahnya dan

²⁷Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 155.

²⁸Chamid, 156.

membantu meningkatkan spiritual yang menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.²⁹

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjanya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui intensif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.³⁰

Kebijakan fiskal telah lama dikenal sejak lama dalam ekonomi Islam yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Selain itu, Abu Yusuf adalah ekonom pertama

²⁹M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Adicitra Intermedia, 2011), 54.

³⁰Ihda Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17, no. 2 (Desember 2019): 43.

yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *Al-Khara*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.³¹

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat Hijriah telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun negara pada masa-masa awal kebangkitan Islam.

Pada masa *khulafaurrasyidin*, kebijakan fiskal telah diterapkan pada beberapa instrumen penerimaan negara seperti yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal (*National Treasury*). Pengenaan pajak ditetapkan atas individu dan tanah, sedangkan cukai ditetapkan atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat.³²

³¹Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 215.

³²Azharsyah, "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah*, 03 (2011): 3.

Quran Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr : 7)

Tafsir dari Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu Allah lalu menjelaskan apa itu fai' dan peruntukannya. Harta rampasan dari mereka, musuh-musuh Allah yang meninggalkan hartanya tanpa perlawanan, maka harta itu diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, penyalurannya adalah untuk Allah, untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial; untuk Rasul guna menopang perjuangan Islam; untuk kerabat Rasul yang membutuhkan bantuan; untuk anak-anak yatim guna menopang pendidikan mereka; untuk orang-orang miskin

agar bisa mengembangkan diri; dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan guna mencari penghidupan yang lebih baik. Singkatnya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam ber-Islam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah sebagai sesuatu yang harus dijauhi, karena di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, dunia akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya bagi kaum yang menolak beriman kepada Rasulullah padahal mereka mengetahui bahwa beliau sebenarnya utusan Allah seperti kaum Yahudi di Madinah.³³

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi sesuai dengan Quran Surat Al-Hasyrayat 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam.³⁴

³³“Qur’an Kemenag.”

³⁴“Kebijakan Fiskal Dalam Islam,” Oktober 2020, <http://www.forshei.org/2020/02/kebijakan-fiskal-dalam-islam.html?m=1#:~:text=Tujuan%20dari%20kebijakan%20fiskal%20dalam,persamaan%20dan%20demokrasi%20yang%20tinggi.>

2. Sumber Pendapatan Negara

a. Pendapatan Negara

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening umum khas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipugut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a) Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Pendapatan asli daerah yang sah, meliputi :
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - 2) Hasil pemanfaatan dan pemberdayaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - 3) Jasa giro.
 - 4) Pendapatan bunga.
 - 5) Tuntutan ganti rugi.

- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.³⁵

Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgeter, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selanjutnya, fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat pemungutan pajak, Mardiasmo menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, yaitu pemungutan pajak harus adil

³⁵Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara," *Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5 (Mei 2019): 83.

(syarat keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Pengelompokkan pajak, menurut Mardiasmo ada tiga jenis pengelompokkan pajak, yaitu :

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Pajak objekif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
 - a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan

perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.

- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- 6) Pajak digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis pajak provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak kendaraan bermotor.
 - b) Pajak balik nama kendaraan bermotor.
 - c) Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak air permukaan.
 - e) Pajak rokok.
- 2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak hotel.
 - b) Pajak reklame.
 - c) Pajak hiburan.
 - d) Pajak penerangan jalan.
 - e) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - f) Pajak parkir.

- g) Pajak air tanah.
- h) Pajak sangkar burung wallet.
- i) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.³⁶

Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁷

b. Pendapatan Negara Islam

Sumber pendapatan negara dalam perspektif Islam zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *'usyur*, pinjaman, *kaffarat*, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Berikut penjelasan dari sumber pendapatan negara dalam perspektif Islam.

1) ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf)

Zakat adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan seseorang yang telah memenuhi syariat Islam, untuk diberikan kepada sebagian masyarakat yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Infak, sedekah dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang dianjurkan dalam Islam. Maka dari itu, zakat, infak,

³⁶Elvi Syahria Mazwanti, dll, "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara," *Universitas Sam Ratulangi Manado* 3 (September 2015): 908.

³⁷Sonny Muhammad Iksan Mangkuwinata, "Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen," *Jurnal Kebangsaan*, 3, no. 6 (July 2014).

sedekah dan wakaf merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.

Konsep yang ada dalam fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak defisit muslim dan pihak surplus muslim. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya proyeksi pemerataan pendapatan antara defisit dan surplus muslim. Jika hal tersebut terjadi di dalam masyarakat, maka bisa dikatakan harta telah terdistribusi secara merata di kalangan masyarakat.

2) *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. *Kharaj* pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah setelah perang khaibar. *Kharaj* dipungut dari non Muslim ketika khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Dalam perkembangannya Adiwarman A. Karim mengungkapkan bahwa *kharaj* menjadi semacam pajak tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim.

Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah dan bukan berdasarkan penetapan wilayah atau daerah. Hal tersebut mempertimbangkan karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis irigasi dan jenis tanaman. Besarnya jumlah pembayaran *kharaj* ditentukan oleh pemerintah. Sementara dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak dikenakan untuk setiap tanah dan bangunan yang merupakan hak milik dan dikenakan setiap tahun.

3) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat non muslim sebagai kompensasi atas

fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. *Jizyah* diambil dari kalangan non muslim selama mereka tetap pada keyakinannya. Namun, apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban mereka untuk membayar *jizyah* telah gugur. Kewajiban membayar *jizyah* diatur dalam Quran Surat At-Taubah : 29.

Pada zaman Rasulullah besarnya *jizyah*, yaitu sebesar 1 dinar per tahun bagi masyarakat yang mampu untuk membayarnya. Sedangkan ketetapan pada masa Umar 28 dirham untuk orang kaya yang mempunyai penghasilan tinggi, 24 dirham untuk orang yang berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja. Pada zaman modern, *jizyah* seperti pajak jiwa yang lakukan oleh pemerintah untuk warga asing yang masuk ataupun menetap dalam wilayah kekuasaan pemerintah atau bisa disebut dengan Visa.

4) *Khums*

Khums merupakan dana yang diperoleh dari seperlima bagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Aturan dari harta rampasan terdapat di dalam Quran Surat Al-Anfal : 41. Dimana ketetapanannya adalah sebagai berikut, seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya, untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir. Seperlima ini disebut sebagai *khums*. Empatperlima bagian lainnya dibagikan untuk anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah *proportional tax*. Harta rampasan perang dikenakan pajak sebesar 20%.

5) *'Usyur*

'Usyur merupakan pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau berasal dari Negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar setahun sekali, dan hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada awalnya pajak ini merupakan kebijakan resiprokal, guna mengimbangi penguasa non muslim yang mengenakan pajak terhadap barang dagangan orang muslim. Pajak ini besarnya bervariasi, 2,5% bagi pedagang muslim, 5% bagi pedagang kafir Dzimmi, dan 10% bagi pedagang kafir Harbi.

6) Pinjaman atau Utang

Pinjaman atau utang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam Islam sifatnya hanya sebagai pendapatan sekunder. Alasannya, yaitu dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga, maka pinjaman dalam Islam tidak ada bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari bagi hasil atau pengumpulan pajak. Islam tidak melarang adanya kegiatan utang piutang asalkan tidak membebani pengutang, karena sifatnya hanya membantu dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat.

7) PenerimaanLain

Penerimaan lain ini berupa *kaffarat* atau denda, misalnya denda yang dikenakan oleh sepasang suami istri yang berhubungan disiang hari pada bulan puasa, maka mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk ke pendapatan negara. Contoh lainnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal

dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan ke pendapatan negara.³⁸

3. Kemiskinan

a. Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrat.

1) Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesarnya-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.³⁹

Paradigma neo-liberal digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini. Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang

³⁸Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," 45.

³⁹Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016), 280.

menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”.⁴⁰

2) Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan.⁴¹

Kemandirian dan kebebasan akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya seperti pendidikan, kesehatan yang

baik dan pendapatan yang cukup. Peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi kemasyarakatan, dimana masyarakat dapat menentukan pilihan dan memenuhi kebutuhannya. Peran negara juga diperlukan dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga).⁴²

⁴⁰Enny Febriana, “Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Pedesaan : Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi” (Jawa Barat, Universitas Indonesia, 2010), 15.

⁴¹Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, 280.

⁴²Febriana, “Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Pedesaan : Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi,” 16.

Holtman mengemukakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh masyarakat yang berkenaan dengan individu, kultur, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan individu adalah kelemahan, biologis bawaan, ketidakmampuan memanfaatkan peluang ekonomi dan kualitas mental psikologis. Kelemahan biologis diperinci lagi menjadi masalah gen (yang sudah diwariskan dalam diri orang miskin), remdahnya intelegensi dan sakit mental. Orang atau kelompok dalam masyarakat menjadi miskin akibat gen yang mengalir dalam tubuh mereka. Demikian halnya dengan orang atau sekelompok yang cacat mental, tentu saja tidak mungkin dapat keluar dari kemiskinan.

Mc Cleland menunjukkan mental sebagai faktor penentu suatu masyarakat menjadi masyarakat miskin dan terbelakang atau menjadi masyarakat yang maju. Mc Cleland mengemukakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi manakala dalam suatu masyarakat terdapat banyak warga yang bermental wiraswasta dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai kemajuan.⁴³

b. Definisi Kemiskinan

Pada kamus ilmiah populer, kata “miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada di posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

⁴³Hubertus Ubur, “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur),” *Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta*, 2012, 210.

Deskripsi lain dari kemiskinan pada awal tahun 1990-an mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.⁴⁴

Berdasarkan UUD No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.⁴⁵

Kemiskinan merupakan kondisi *absolute* atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural atau struktural. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk menaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya. Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang pendapatan keluarganya lebih kecil dari pada suatu angka *absolute* yang disebut sebagai batas garis kemiskinan.⁴⁶

⁴⁴Malik, *Ekonomi Makro & Mikro*, 164.

⁴⁵Abdul Rohman, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa," jurnal Pembangunan Perdesaan, IV, no. 2 (Agustus 2004): 147.

⁴⁶Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kuantan Singingi," *Universitas Riau* 4 (February 2017): 110.

c. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non materil. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala pada dasarnya bersifat *intregated property*. Jadi kemiskinan bukan memiliki satu dimensi. Kaitannya dengan hal tersebut maka indikator kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial, baik secara fisik maupun non fisik.⁴⁷

Tabel 2.1 Indikator-indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan	Fisik	Non fisik
Ekonomi	1. Kepemilikan lahan 2. Lahan garapan 3. Kualitas rumah perabot rumah tangga 4. Sarana transport	1. Pendapatan keluarga 2. Pengeluaran untuk perumahan 3. Pengeluaran untuk pendidikan 4. Pengeluaran untuk kesehatan
Sosial	1. Fasilitas pendidikan 2. Fasilitas kesehatan 3. Fasilitas sampah 4. Fasilitas air bersih 5. Fasilitas sanitasi	1. Tidak buta huruf 2. Kesehatan ibu 3. Kesehatan balita 4. Penyerapan anak usia sd 5. Kegotongroyongan

⁴⁷Fajrin Hardinandar, "Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua," *Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan*, 4, no. 1 (2019).

Sumber : Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan, “Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua) tahun 2019

Menurut Badan Pusat Statistik ada beberapa indikator kemiskinan, yaitu :

1) Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai keetidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman dan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkpita perhari. Paket komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan ,daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Perhitungan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

3) Presentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-PO) adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

5) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.⁴⁸

Indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,

⁴⁸Badan Pusat Statistik (BPS),” January 21, 2021, <http://www.bps.go.id>.

sanitasi, air bersih dan transportasi).

3) Tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan

keluarga.

4) Kerentanan terhadap guncangan yang berasal dari individual maupun massa.

5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.⁴⁹

d. Faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, antara lain adalah :

1) Merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita secara global.

Standar pendapatan perkapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan perkapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menurun maka pendapatan perkapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan perkapita :

a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

b) Politik ekonomi yang tidak sehat.

c) Faktor-faktor luar negeri, diantaranya rusaknya syarat-syarat perdagangan, beban utang bantuan luar negeri dan perang.

⁴⁹Malik, *Ekonomi Makro & Mikro*, 165.

- 2) Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Terlihat jelas faktor ini sangatlah penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.

- 3) Biaya kehidupan yang tinggi.

Semakin tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

- 4) Pembagian subsidi *in come* pemerintah yang kurang merata.

Hal ini menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan masyarakat. Bahkan di sisi lain rakyat miskin terbebani oleh pajak negara.⁵⁰

e. Teori Kemiskinan dalam Islam

Ibnu Hazm menyebutkan empat kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian dan perlidungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara dan dingin serta

⁵⁰Malik, 166.

hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.

Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran). Kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi.⁵¹

Berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Ibnu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat yang wajib dipenuhi oleh orang kaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang yang lemah secara ekonomi. Salah satu pandangan Ibnu Hazm yang menarik dari masalah ini dapat dilihat bahwa, orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin diantara mereka. Pemerintah harus memaksa hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.⁵²

Ibnu Hazm mendasarkan pandangannya tersebut pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 :

⁵¹Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 262.

⁵²Chamid, 263.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
 الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." (Q.S. An-Nisa: 36)

Tafsir dari Qur'an Surat An-Nisa ayat 36, yaitu ayat-ayat di atas yang berbicara tentang aturan dan tuntunan kehidupan rumah tangga dan harta waris, memerlukan tingkat kesadaran untuk mematuhi. Ayat ini menekankan kesadaran tersebut dengan menunjukkan perincian tempat tumpuan kesadaran itu dipraktikkan. Dan sembahlah Allah Tuhan yang menciptakan kamu dan pasangan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua, juga kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh walaupun tetangga itu nonmuslim, teman sejawat, ibnu sabil, yakni orang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang

sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.⁵³

Hak-hak yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi orang kaya, dipahami Ibnu Hazm sebagai suatu kewajiban. Hak-hak yang mesti dipenuhi tersebut tidak lain merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan yang layak dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama-sama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Bagaimanapun juga, kemiskinan tidak pernah dikehendaki oleh siapapun. Orang miskin harus dibantu untuk bisa terbebas dari kemiskinan yang membelenggu.⁵⁴

f. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya walaupun dalam keadaan memiliki pekerjaan atau penghasilan.⁵⁵ Kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keuangan dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 1-7 bahwa kemiskinan itu berada semenjak manusia itu ada. Banyak manusia yang mengaku beragama dan sholat tetapi tidak ingin menolong orang yang lemah dan miskin termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa

⁵³“Qur'an Kemenag.”

⁵⁴Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 264.

⁵⁵Eupsi Isdanyo Istriana, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 32.

kemiskinan dan ketidakmiskinan akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.⁵⁶

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan umat Islam untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng moral menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Islam telah memberikan jawaban terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".(Q.S. An-Nisa: 9)

Tafsir dari Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, yaitu Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anakanak yang lemah dalam keadaan

⁵⁶Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam* (Malang: UMM Pers, 2005), 353.

yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.⁵⁷

Salah satu pesan moral yang disampaikan ayat ini adalah hendaknya orang-orang yang hidup saat ini berfikir dan merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah, makna lemah disini bukan hanya dari sisi kecukupan ekonominya saja, namun lebih dari itu, lemahnya intelektual, lemahnya jiwa sosial serta lemahnya keimanan terhadap nilai-nilai agama merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang hidup saat ini. Semua ini bertujuan agar terciptanya generasi yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap peradaban umat yang lebih baik.

Rezeki yang berbeda diberikan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari sisi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda dilihat dari segi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini dapat mencegah kecemburuan sosial dan mencukupi kebutuhan pokok kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.⁵⁸

Menurut Korayem dan Mashhour kemiskinan dalam ekonomi Islam diestimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*), barang siapa yang hidup di bawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin. Tingkat

⁵⁷“Qur’an Kemenag.”

⁵⁸Muhammad Nur Rohani, “Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam,” Jurnal dan Makalah, 8, no. 1 (Mei 2014).

kecukupan dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syariah, yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁹Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist pemikir ekonomi Islam mengemukakan indikator kemiskinan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut Taqiyuddin An-Nabani, diantara kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan secara layak. Pemikiran ini berlandaskan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرْفِ ۚ

Artinya: "...kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...". (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Tafsir dari ayat di atas, yaitu Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah.⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan primer harus terpenuhi secara layak. Indikator kebutuhan primer juga berdasarkan hadist Rasulullah SAW, bersabda : *"Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan."* (HR. Ibnu Majah).

⁵⁹Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam," *Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Ilmiah*, 2017.

⁶⁰"Qur'an Kemenag."

2) Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi dan Spiritual

Menurut pemikiran dari Irfan Syauci Beik, dalam melihat kemiskinan ia membagi tiga kebutuhan pokok manusia yaitu bisa melaksanakan ibadah, terpenuhi sandang, pangan dan papan, dan tidak adanya rasa takut. Hal ini berdasarkan pada surat Quraisy ayat 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن

جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." (Q.S.Quraisy: 3-4)

Tafsir dari ayat di atas, yaitu Mereka pergi berniaga tiap tahun dengan aman dan sentosa. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini, yaitu Kakbah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Mereka pergi berniaga tiap tahun dengan aman dan sentosa. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini, yaitu Kakbah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima.⁶¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan tidak akan terjadi apabila kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi dan Allah telah menjamin setiap rezeki umatnya untuk terhindar kemiskinan dan ketakutan.

⁶¹“Qur’an Kemenag.”

3) Garis Batas Nishab

Batas nishab menjadi indikator ekonomi Islam dalam melihat kemiskinan. Pemikir Islam berpendapat bahwa garis batas nishab berperan dalam menentukan kaya atau miskinnya seseorang. Skema Islam tentang zakat menjadi acuannya. Apabila harta yang dimiliki seseorang dalam setahunnya mencapai nishab (sama dengan 94 gram emas) maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang kaya dan wajib mengeluarkan zakatnya dan berlaku sebaliknya untuk penerima zakat.⁶²

Kemiskinan dalam persepektif Islam timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpastian dan kebakhilan kelompok kaya. Sehingga orang-orang yang miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi dan ekonomi di suatu tangan. Kelima, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.⁶³

Menurut KH. Ali Yafie, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu :

- 1) Kelemahan, baik itu kelemahan hati dan semangat atau kelemahan akal dan ilmu atau kelemahan fisik.

⁶²Ismail, "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam," *Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima* 3, no. 1 (2020): 117.

⁶³Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional," *Jurnal of Islam Economics and Bussines*, 1, no. 1 (June 2018).

Semua itu dapat mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2) Kemalasan merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan oleh Islam sangat bertolak belakang dengan sifat kemalasan.
- 3) Ketakutan merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada dalam dirinya.
- 4) Kepelitan, sifat ini biasa terjadi kepada orang yang kaya dan tanpa disadari kepelitan tersebut tidak membantu mengurangi kemiskinan dan menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk tidak disukai oleh orang miskin.
- 5) Terlilit hutang, terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati-hati jangan sampai terjatoh oleh hutang, karena hutang sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang, maka sulit sekali bagi dirinya untuk keluar dari kemiskinan.
- 6) Diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya penderitaan dan kemelaratan, baik untuk perorangan maupun masyarakat, bangsa dan negara. Pemerasan oleh manusia yang kuat menimbulkan sistem perbudakan dan pemerasan oleh manusia yang kaya menimbulkan riba. Pemerasan pada tingkat masyarakat bangsa dan negara menimbulkan sistem kapitalisme. (relevansi agama dan kemiskinan)

B. Pengujian Hipotesis

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dimana peruntukkannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Perkembangan penerimaan pajak pada tahun 2010-2019 menunjukkan secara *trend* positif atau mengalami peningkatan. Penduduk miskin selalu mengalami penurunan dilihat dari angka pertumbuhan yang selalu negatif. Sekalipun demikian penurunan jumlah penduduk miskin masih tergolong stagnan dengan penurunan di bawah 5 persen per tahunnya.⁶⁴ Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shandy Jannifer Matitaputty dengan judul penelitian Pengaruh Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Diperoleh hasil penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang sangat kuat terhadap persentase jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang hubungan penerimaan pajak terhadap kemiskinan, maka dapat disimpulkan hipotesisnya dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ho : Pajak daerah tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Ha : Pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

⁶⁴Jannifer Matitaputty, dll, "Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," 13.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Al Arif, M Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Adicitra Intermedia, 2011.
- Andy, Hasan. *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017.
- Chapra. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ishomuddin. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Pers, 2005.
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Malik, Anas. *Ekonomi Makro & Mikro*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.
- Modul Ekonometrika Analisis Dan Pengolahan Data Dengan SPSS Dan EVIEWS*, n.d.
- Modul Ekonometrika Teori Dan Terapan*, n.d.
- Modul Pajak Daerah*, n.d.
- Rahardja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi)*. 3rd ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015.
- Syafi'i, and Antonio Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. Gema Insani, 2001.
- Sudirman, I Wayan. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Teori Dan Empirikal*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015.

Wahyu Winarno, Wing. *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan Eviews*. 4th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Jurnal :

Abdullah, Hayat. “Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan,” *Jurnal Bina Praja*, 6, no. 2 (June 2014).

Aini, Ihda. “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17, no. 2 (Desember 2019).

Azharsyah. “Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Syariah*, 03 (2011).

B. Prasetyo, Hermawan, and Arif Farid. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran.” *STIE Cendekia Bojonegoro*, *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 6 (2012).

Darusman. “Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan (Analisis Pemikiran Abdul A’la Al-Maududi Dan Yusuf Al-Qardawi),” tt.

Eka Satya, Venti. “Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013,” *Jurnal Kajian*, 19, no. 2 (June 2014).

- Fathurrahman, Ayief. "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13, no. 1 (April 2012).
- Fauzan, Muhammad. "Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khatab," *Human Falah*, 4, no. 1 (June 2017).
- Febriana, Enny. "Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Pedesaan : Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi." Universitas Indonesia, 2010.
- Gde Bendesa, I Komang, and Ni Putu Wiwin Setyari. "Kebijakan Fiskal Dengan Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Pada Tahun 2020," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13, no. 1 (February 2020).
- Hardinandar, Fajrin. "Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua)," *Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan*, 4, no. 1 (2019).
- Iqbal, Muhammad. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam." *Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Ilmiah*, 2017.
- Isdanyo Istriana, Eupsi. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ismail. "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam." *Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima* 3, no. 1 (2020).
- Jannifer Matitaputty, dll, Shandy. "Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Unika Soegijapranata Semarang*, 2020.
- "Kebijakan Fiskal Dalam Islam," Oktober 2020.
<http://www.forshei.org/2020/02/kebijakan-fiskal-dalam->

Rohman, Abdul. "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa,"
jurnal Pembangunan Perdesaan, IV, no. 2 (Agustus 2004).

Sarjono, Nadya, Choirul Anwar, and Darmansyah. "Analisa Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat." *Universitas Pancasila, Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 6 (2018).

Setiawan, Heru. "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia Dengan Model
Structural Vector Autoregression (SVAR)," *Jurnal Ilmu
Ekonomi Terapan*, 3, no. 2 (Desember 2018).

Silastri, Novri. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan
Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten
Kuantan Singingi." *Universitas Riau* 4 (February 2017).

Syahria Mazwenty, dll, Elvi. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Maluku Utara." *Universitas Sam Ratulangi Manado* 3
(September 2015).

Ubur, Hubertus. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa
Tenggara Timur)." *Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya,
Jakarta*, 2012.

Usman, Umarudin. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi
Kepulauan Riau." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Malikussaleh* 01 (Agustus 2018).

Website :

"Badan Pusat Statistik (BPS)," January 21, 2021.
<http://www.bps.go.id>.

"Kebijakan Fiskal Dalam Islam," Oktober 2020.
<http://www.forshei.org/2020/02/kebijakan-fiskal-dalam->

